

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pasca keruntuhan Francisco Franco pada tahun 1975, Spanyol mulai menjalankan sistem demokrasi yang tertuang dalam konsitusi Spanyol (*Constitución Española*) tahun 1978. Pada konstitusi tersebut, bangsa Spanyol yang sebelumnya menganut politik otoritarian kemudian menginginkan sistem pemerintahan mereka menjadi negara semi-federal. Hal ini berarti setiap daerah provinsi mempunyai otonomi kuat untuk menjalankan pemerintahannya sendiri, mulai dari menetapkan kebijakan, sistem pendidikan, maupun kontrol atas media massa.

Keinginan tersebut timbul disebabkan masyarakat Spanyol mengalami tekanan dalam berdemokrasi, baik secara individu maupun berkelompok. Transisi demokrasi yang dialami bangsa Spanyol pada era tersebut menjadi penentu bagaimana politik dan sistem pemerintahan mereka tidak terpusat pada pemerintahan kerajaan Spanyol. Alvarez-Galvez (2018, hlm. 2) memaparkan bahwa terdapat pengalihan kekuasaan dan tanggung jawab yang relevan secara politik kepada pemerintah daerah yang termaktub di dalam pasal 148 dan 149 konstitusi Spanyol tahun 1978.

Jika dilihat dari literatur ilmu politik, negara terbagi menjadi dua yaitu bentuk negara kesatuan dan negara federal yang memiliki negara-negara bagian. Istilah negara bagian sebenarnya berbeda dalam penyebutannya di beberapa negara. Di Amerika serikat negara bagian disebut istilah “*state*,” sementara seperti di Argentina disebut sebagai “*province*” (Susanto, 2019, hlm. 20). Dalam hal ini, Spanyol masuk ke dalam kategori negara federal karena di dalamnya terdapat negara-negara bagian yang memiliki otonominya sendiri. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, negara bagian diberikan hak khusus untuk memerintah masyarakatnya sendiri.

Selain itu, sebagai sebuah negara federal, Spanyol tampaknya masih mengatur secara rinci hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya

meskipun dalam bentuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara bagian telah menjalankannya secara mandiri, namun pemerintah pusat punya kewenangan yang jauh lebih besar. Jika merujuk pada Amerika, dapat disimpulkan bahwa Washington sebagai Ibu Kota adalah pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan lebih besar dibanding negara-negara bagian. Dan pada Spanyol, Madrid-lah yang punya andil besar, sementara salah satu negara bagian seperti Catalonia dan Basque di bawah Madrid. Kedua negara bagian tersebut masuk ke dalam dua wilayah di Spanyol yang mendapat perlakuan khusus berupa otonomi daerah (Alvarez-Galvez, 2018, hlm. 3).

Melihat dari konsep cinta tanah air, Alvarez-Galvez (2018, hlm. 4) menuliskan bahwa pada akhirnya terdapat identitas ganda yakni rasa nasionalisme sebagai rakyat daerah otonom, dalam hal ini Catalonia atau Basque (secara regional), serta sebagai warga negara Spanyol. Dalam pandangan peneliti, hal ini menyebabkan rasa nasionalisme regional mereka lebih tinggi karena masyarakatnya sangat menjunjung terhadap kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat yang sudah dilestarikan secara turun temurun. Terlebih pada daerah otonom Catalonia yang berdasarkan segi historisnya sendiri memiliki perjuangan panjang dalam menuntut demokrasi khususnya pemisahan diri dari Spanyol.

Secara geografis, Catalonia adalah wilayah otonom di Spanyol dengan luas wilayah sebesar 12.390 mil persegi atau setara dengan 32.091 kilometer persegi, dan memiliki populasi yang mencapai 8.005.784 jiwa. Ibu kota dari wilayah ini adalah Barcelona, kota yang terkenal dengan keindahan arsitektur dan budayanya (Institut d'Estadística de Catalunya, 2023, hlm. 1). Meskipun memiliki status sebagai wilayah otonom, pemerintah Catalonia memutuskan untuk memisahkan diri dari Spanyol karena merasa bahwa hak-hak otonomi yang mereka miliki tidak sepenuhnya dihormati oleh pemerintah pusat Spanyol. Selain itu, Catalonia memiliki identitas, budaya, dan bahasa yang unik dan berbeda, yang membuat mereka merasa berbeda dari warga Spanyol pada umumnya.

Konflik antara Spanyol dan Catalonia bukanlah sesuatu yang baru dan telah berlangsung lama. Secara historis, Catalonia adalah bagian dari Kerajaan Aragon, sementara Spanyol adalah bagian dari Kastila. Dua daerah ini disatukan pada tahun 1469 melalui pernikahan antara Ferdinand I dari Aragon dan Ratu Isabella dari

Kastila. Pernikahan ini menciptakan persatuan dinasti antara Kastila dan Kerajaan Aragon, yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Spanyol modern (Kleiner-Liebau, D, 2009, hlm. 40).

Persatuan antara kerajaan Aragon dan Kastilia menyebabkan terbentuknya provinsi Catalonia dan Spanyol pada tahun 1469, yang kemudian dilanda epidemi dan peperangan serta mengalami penurunan ekonomi dan populasi yang cepat (Hargreaves, 2000, hlm. 18). Sebuah solusi muncul dimana Catalonia akan mempertahankan institusi independen, mata uang, bea cukai, dan perpajakan, serta mempertahankan bahasa Catalan sebagai bahasa resminya. Namun, terlepas dari manfaat perjanjian ini, Catalonia masih terekspos secara politik dan melemah secara ekonomi. Para petani Catalan berusaha memperoleh kemerdekaan selama Perang Spanyol-Prancis tahun 1640, namun upaya pemberontakan yang sebenarnya melawan Spanyol terjadi dalam Perang Spanyol tahun 1714, dimana Inggris dan sekutunya berperang melawan Prancis dan Spanyol. Sayangnya, Catalonia gagal dalam upayanya dan dihadapkan pada Dekrit *Nueva Planta*, yang secara efektif menghapuskan sistem politik Catalonia dan memberlakukan hukum Kastilia, absolutisme, dan sentralisme (Hargreaves, 2000, hlm. 19).

Perang 30 tahun pada tahun 1618-1659 mengancam *Courts of Barcelona* untuk turut andil dalam melawan Prancis. Di sisi lain masyarakat Catalan tidak memiliki dendam pada pihak manapun. Barcelona bersekutu dengan Inggris memihak Dinasti Habsburg pihak yang kalah. Setelah perang 30 tahun berakhir membawa dampak mengecewakan bagi Catalonia. Karena kekalahan dalam perang, *House of Bourbon* mengklaim takhta Spanyol dan mengepung Kota Barcelona. Wilayah tersebut jatuh pada tanggal 11 September 1714. Felipe V, raja yang berkuasa pada saat itu dari Bourbon memberlakukan berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut berupa pelarangan bahasa Catalan, universitas setempat ditutup, mengubah katedral *Lleida's Gothic* menjadi barak militer, dan membangun benteng untuk mengawasi penduduk (Hargreaves, 2000, hlm. 20).

Meskipun sejak hilangnya wilayah tersebut terdapat klaim untuk memulihkan keadaan. Permulaan separatisme di Catalonia dapat ditelusuri kembali ke pertengahan abad ke-19. Gerakan *Renaixença* (kebangkitan budaya), yang bertujuan untuk menghidupkan kembali bahasa Catalan dan tradisi Catalan,

menyebabkan berkembangnya nasionalisme Catalan dan keinginan untuk memiliki pemerintahan sendiri, entah melalui republik federal Spanyol atau bahkan kemerdekaan Catalonia itu sendiri. Antara tahun 1850-an dan 1910-an, beberapa individu, organisasi, dan partai politik mulai menuntut kemerdekaan penuh Catalonia dari Spanyol (Hargreaves, 2000, hlm. 21).

Pada abad ke-20, muncul partai politik pro-kemerdekaan pertama di Catalonia yang dikenal dengan nama *Estat Català*. Didirikan pada tahun 1922 oleh Francesc Macià, partai ini bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Catalonia. Namun, pemimpin dari partai ini diasingkan ke Prancis selama kediktatoran Primo de Rivera yang berlangsung dari tahun 1923 hingga 1930. Meskipun demikian, Macià tetap melanjutkan perjuangannya dan melancarkan pemberontakan yang gagal pada tahun 1926 (Balfour, 2017, hlm. 2).

Setelah penggulingan Primo de Rivera pada bulan Maret 1931, *Estat Català* bergabung dengan *Partit Republicà Català* dan kelompok politik *L'Opinió* untuk membentuk *Esquerra Republicana de Catalunya* (ERC) dengan Macià sebagai pemimpinnya. Bulan berikutnya, ERC memenangkan pemilihan umum di Catalonia dengan kemenangan yang gemilang, yang memungkinkan Macià untuk memproklamasikan Republik Catalan pada 4 April 1931. Namun, setelah melalui proses negosiasi dengan pemerintah pusat, Catalonia akhirnya mendapatkan otonomi di bawah Generalitat Catalonia yang dihidupkan kembali. Undang-undang otonomi ini diberikan kepada Catalonia pada tahun 1932 dan berlangsung hingga terjadinya Perang Saudara Spanyol (Balfour, 2017, hlm. 3).

Namun, pada tahun 1938, Jenderal Franco menghapuskan Undang-Undang Otonomi dari Generalitat de Catalunya dalam upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Setelah kematian Franco pada tahun 1975, Spanyol mulai bergerak untuk memulihkan demokrasi. Sebuah konstitusi baru diadopsi pada tahun 1978, yang menegaskan "kesatuan tak terpisahkan dari Bangsa Spanyol," tetapi juga mengakui "hak otonomi kebangsaan dan daerah yang membentuknya." Dengan demikian, Catalonia mendapatkan kembali otonominya. Meskipun begitu, beberapa pihak independen menolak konstitusi ini dengan alasan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip penentuan nasib sendiri bagi bangsa Catalan. Mereka kemudian membentuk *Comité Català Contra la Constitució Espanyola* (Komite

Catalan Terhadap Konstitusi) sebagai bentuk penolakan terhadap konstitusi tersebut (Balfour, 2017, hlm. 5).

Namun pada akhirnya, tepatnya pada bulan Mei tahun 1983, seluruh negara Spanyol telah dibagi menjadi 17 *comunidades autónomas* (daerah otonom), yaitu seperti Basque, Catalonia, Galicia, Andalusia, Asturias, Aragon, Kepulauan Balearic, Kepulauan Canary, Cantabria, Castile dan León, Castile-La Mancha, Extremadura, Navarra, La Rioja, Madrid, Murcia, dan Valencia. Pada tahun 1995 dua kota otonom ditambahkan, yaitu Ceuta dan Melilla.

Struktur pemerintahan di setiap komunitas serupa dengan institusi-institusi politik di pemerintahan pusat secara keseluruhan. Masing-masing daerah otonom memiliki badan legislatif yang dipilih melalui hak pilih universal masyarakat regional yang sudah memiliki hak pilih serta seorang eksekutif yang terdiri dari seorang presiden dan dewan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada badan legislatif tersebut (Kleiner-Liebaw, D, 2009, hlm. 52).

Disisi lain, konflik antara Catalonia dan Spanyol tidak berhenti di situ saja. Seperti yang sudah di singgung di atas, terlepas dari konstitusi Spanyol tahun 1978 yang menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terpusat sepenuhnya, pada kenyataannya masih terdapat diskriminasi antara pemegang kekuasaan tertinggi dengan daerah-daerah otonom, khususnya di Catalonia. Di masa kontemporer ini, tercatat terdapat beberapa demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Catalonia terhadap kebijakan pemerintah Spanyol, salah satunya ialah protes akibat pelemahan undang-undang otonomi tahun 2009-2010 (Tandy, 2010, hlm. 2).

Salah satu bentuk demonstrasi akibat dari konflik antara Catalonia dengan Spanyol terjadi pada tahun 2010. Masyarakat Catalonia menentang pembatasan undang-undang otonomi Catalonia, dan khususnya terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi Spanyol yang membatalkan atau menafsirkan ulang beberapa pasal Undang-Undang Otonomi Catalonia tahun 2006. Jumlah demonstran yang ambil bagian dalam demonstrasi diperkirakan antara 1,1 juta (menurut polisi setempat) dan 1,5 juta (menurut penyelenggara), sementara surat kabar El País yang berbasis di Madrid memperkirakan jumlah demonstran mencapai 425.000 orang (El País, 2010, hlm. 1).

Mobilisasi tersebut digambarkan sebagai sesuatu yang "belum pernah terjadi sebelumnya" oleh Wali Kota Barcelona. Surat kabar harian Barcelona *El Periódico de Catalunya* menggambarannya sebagai "tidak diragukan lagi salah satu demonstrasi terbesar yang pernah terjadi di Catalonia, mungkin yang terbesar". Demonstrasi kemerdekaan Catalan pada tahun 2012 diperkirakan melibatkan lebih banyak orang, namun protes ini membawa perselisihan tersebut ke permukaan dunia. Demonstrasi tersebut juga dihiasi oleh spanduk bertuliskan slogan dalam bahasa Catalan yang bertuliskan "*Som una nació. Nosaltres decidim*" (Kami adalah sebuah bangsa. Kami memutuskan).

Pada dasarnya, Undang-Undang Otonomi Catalonia tahun 2006 (*Estatut d'Autonomia de Catalunya*) memberikan peraturan kelembagaan dasar Catalonia berdasarkan Konstitusi Spanyol tahun 1978. Undang-undang ini mendefinisikan hak dan kewajiban warga Catalonia, institusi politik komunitas Catalan, kompetensi mereka dan hubungan dengan seluruh Spanyol, dan pembiayaan Pemerintah Catalonia. Namun, seperti pembahasan di atas, Mahkamah Konstitusi Spanyol menolak atas permintaan tersebut. Imbas dari kebijakan tersebut, masyarakat Catalonia terus melakukan berbagai upaya dalam menuntut hak mereka, baik melalui demonstrasi maupun referendum.

Pada November 2014, rakyat Catalan mengadakan referendum dengan harapan dapat memisahkan diri dari Spanyol dan membentuk negara merdeka. Namun, hasil dari referendum tersebut tidak sesuai dengan harapan mereka. Pemerintah Spanyol dengan tegas menolak Parlemen Catalonia untuk mengadakan referendum, menganggapnya sebagai tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan konstitusi (Generalitat de Catalunya, 2014, hlm. 3). Meskipun demikian, semangat kemerdekaan rakyat Catalan tidak padam dan mereka melanjutkan perjuangan mereka dengan mengadakan referendum lain pada Oktober 2017. Sayangnya, meskipun telah melakukan dua kali referendum, yaitu pada tahun 2014 dan 2017, Catalonia selalu gagal karena kurangnya dukungan dari pemerintah pusat Spanyol maupun dari komunitas internasional. Kedua referendum tersebut dianggap inkonstitusional oleh pemerintah Spanyol, yang menyebabkan pemerintah menunda penandatanganan hasil referendum Catalonia.

Pada 1 Oktober 2017, Catalonia mengadakan referendum kemerdekaan yang sangat kontroversial dan penuh dengan ketegangan. Pengadilan Spanyol segera menyatakan bahwa pemungutan suara tersebut ilegal dan memerintahkan polisi nasional serta garda sipil, yaitu sebuah unit militer yang bertugas untuk melakukan pemolisian domestik, untuk menghentikan referendum dengan alasan "menghormati koeksistensi". Akibat dari tindakan keras ini, 844 orang cedera akibat kekerasan yang dilakukan oleh polisi nasional Spanyol. Meskipun demikian, demonstrasi terus berlangsung di berbagai tempat untuk menuntut pemerintah Spanyol agar menyetujui hasil referendum sesegera mungkin (Generalitat de Catalunya, 2017, hlm. 6). Selain itu, banyak tokoh penting dari Catalonia, seperti Jordi Sánchez dan Jordi Cuixart, ditahan oleh pemerintah Spanyol atas perintah seorang hakim Spanyol. Keduanya dianggap sebagai pemimpin utama dalam penyelenggaraan referendum kemerdekaan Catalonia pada 1 Oktober 2017 (El Pais, 2017, hlm. 3).

Karena pemerintah Spanyol menganggap referendum tersebut ilegal dan tidak sesuai dengan konstitusi, mereka menunda penandatanganan hasil referendum Catalonia, meskipun 90.18% rakyat Catalan dalam referendum 2017 menyatakan keinginan mereka untuk memisahkan diri dari Spanyol (Fotheringham, 2017). Pada referendum tahun 2017, pemerintah Spanyol menolak untuk menyetujui kesepakatan apapun, baik itu dalam bentuk negosiasi maupun mediasi dengan Catalonia. Akibatnya, pemerintah Spanyol menanggukkan otonomi Catalonia dengan menerapkan pasal 155 konstitusi Spanyol. Tindakan ini diambil karena pemerintah pusat menganggap bahwa situasi tersebut telah merugikan dan menyebabkan kekacauan. Oleh karena itu, dalam referendum terbaru ini, Catalonia gagal mendapatkan pengakuan baik dari Spanyol sebagai host state maupun dari komunitas internasional secara global (McRoberts, 2022, hlm. 76).

Referendum juga diatur dalam konstitusi Spanyol tahun 1978 pasal 92 (1, 2, dan 3), yang menyatakan bahwa keputusan politik penting dapat diajukan kepada rakyat dalam bentuk referendum konsultatif. Tindakan untuk mengadakan referendum harus memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan dalam konstitusi. Setelah semua syarat dan prosedur terpenuhi, kongres akan memberikan persetujuan untuk dilakukannya referendum. Selanjutnya, referendum akan

diadakan oleh raja setelah mendapatkan otorisasi dari kongres (Konstitusi Spanyol, 1978, hlm. 29). Dalam kasus Catalonia, pemerintah Spanyol menyatakan bahwa referendum Catalonia baik pada tahun 2014 maupun 2017 adalah ilegal karena tidak sesuai dengan pasal yang disebutkan dalam konstitusi, yang mengharuskan persetujuan kongres sebelum referendum dapat dilakukan atas panggilan raja.

Dalam hal ini, referendum Catalonia tidak mendapatkan persetujuan dari kongres sehingga tidak adanya panggilan dari raja untuk diadakannya referendum, dan kedua referendum tersebut dinyatakan ilegal dan tidak konstitusional. Meskipun pemerintah Catalonia memiliki landasan hukum sendiri yang mengacu pada deklarasi kedaulatan tahun 2013, deklarasi ini menegaskan bahwa Catalonia adalah subjek yang berdaulat dari sudut pandang hukum dan politik. Deklarasi kedaulatan ini seharusnya menjadi awal dari sebuah proses di mana masyarakat Catalan akan diizinkan untuk memilih masa depan mereka (Dankowski, 2019, hlm. 5).

Mahkamah Konstitusi Spanyol menyatakan bahwa Catalonia tidak akan pernah dapat melegalkan referendum meskipun apa yang telah dilakukannya sesuai dengan deklarasi kedaulatan tahun 2013. Hal ini terjadi karena konstitusi Spanyol pasal 1 dan 2 menegaskan bahwa Catalonia merupakan “kesatuan tak terpisahkan dari Bangsa Spanyol” dan pasal 3 (3) menyatakan bahwa “kekayaan bahasa yang berbeda dari Spanyol adalah warisan budaya yang harus dihormati dan dilindungi secara khusus” (Konstitusi Spanyol, 1978, hlm. 9). Pemerintah Catalonia tidak memiliki kewenangan untuk merubah konstitusi yang ada, hanya pemerintah Spanyol yang dapat mengubah konstitusi.

Selanjutnya, krisis konstitusional terjadi di Spanyol pasca referendum tahun 2017 sebagai akibat dari konflik politik antara Pemerintah Spanyol dengan pemerintah Catalonia, yang pada saat itu dipimpin oleh Carles Puigdemont, mengenai isu kemerdekaan Catalonia. Hal ini dimulai setelah undang-undang yang mengizinkan referendum kemerdekaan Catalan pada tahun 2017 dikecam oleh pemerintah Spanyol di bawah Perdana Menteri Mariano Rajoy dan kemudian ditangguhkan oleh Mahkamah Konstitusi hingga memutuskan masalah tersebut. Beberapa media internasional menggambarkan peristiwa tersebut sebagai "salah

satu krisis politik terburuk dalam sejarah modern Spanyol" (Stothard, 2017, hlm. 2).

Imbas dari peristiwa di atas berujung pada pemerintah Spanyol mengakhiri otonomi wilayah Catalonia dengan mengatur langsung daerah otonom tersebut, berikut dengan mengambil kendali atas keseluruhan institusi dan infrastrukturnya. Pemerintah Spanyol bersama partai konservatif bernama Partai Vox kemudian mulai mengadili kasus terhadap beberapa pemimpin daerah otonom, serta penyelenggara referendum. Mereka dibawa ke hadapan Mahkamah Agung Spanyol dalam persidangan para pemimpin kemerdekaan Catalonia. Pada 14 Oktober 2019, sembilan pemimpin kemerdekaan Catalan dijatuhi hukuman antara sembilan dan 13 tahun penjara, dan tiga lainnya didenda. Tidak lama kemudian, masyarakat Catalonia melaksanakan demonstrasi besar-besaran akibat dari putusan Mahkamah Agung tersebut (BBC, 2019, hlm. 1). Hal tersebut jelas bertentangan dengan konstitusi Spanyol tahun 1978 yang menjamin hak otonomi bagi setiap daerah khususnya Catalonia.

Berbagai tantangan demokrasi yang dialami baik oleh pemerintah Catalonia maupun masyarakatnya tentu berdampak terhadap cara bagaimana mereka hidup dan berekspresi terlebih dalam berpendapat di khalayak umum. Masyarakat Catalonia terus berupaya untuk selalu memperjuangkan suara mereka dengan cara melalui berbagai media atau wadah yang menjadi reaksi dari kelompok mereka. Salah satu wadah yang menampung aspirasi masyarakat tersebut ialah melalui bidang olahraga.

Tidak ada institusi olahraga lain di dunia yang lebih terkena dampak emosional dari krisis politik yang terjadi di Spanyol terkait isu Catalonia selain FC Barcelona. *Barca* juga dalam sebagian besar sejarah modernnya tidak hanya menjadi salah satu klub sepak bola terkemuka di dunia saja. Motto *Mes Que Un Club* (lebih dari sekedar klub) menjadi fenomenan sosial, budaya, politik, dan rasa identitasnya dibingkai oleh nasionalisme masyarakat Catalan. FC Barcelona dan Catalonia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Klub sepakbola tersebut pada dasarnya bukan hanya sebagai media hiburan saja, akan tetapi sebagai suara masyarakat Catalonia dalam melewati berbagai tantangan demokrasi di Spanyol.

Klub ini telah berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 1899 oleh sekelompok ekspatriat asing yang tinggal di Barcelona. Sentimen anti-Madrid berkobar pada tahun berdirinya klub tersebut ketika kerajaan Spanyol kehilangan koloni terakhirnya di Karibia. Dan tahun-tahun awalnya bertepatan dengan gelombang besar pertama nasionalisme politik Catalan ketika wilayah tersebut mulai melakukan penuntutan untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar. Di tahun-tahun berikutnya, FC Barcelona dikenal sebagai tim Catalan dan menanggung konsekuensinya setiap kali negara Spanyol bertindak untuk menekan hak-hak rakyat Catalan.

Selama Perang Saudara Spanyol, wakil parlemen regional Catalan yang pro-kemerdekaan sekaligus presiden FC Barcelona kala itu, Josep Sunyol dieksekusi oleh pasukan Jenderal Francisco Franco di dekat Madrid, dan banyak anggota klub tersebut dianiaya secara politik oleh rezim Franco yang memerintah antara 1939-1975. Jenazahnya baru digali pada tahun 1990-an setelah Els Amics de Josep Sunyol (Sahabat Josep Sunyol) berkampanye agar FC Barcelona mengakui peringatan 60 tahun kematiannya pada tahun 1996. Sebuah batu peringatan untuk Sunyol ditempatkan di taman dekat lokasi dia terbunuh, dan Sunyol sekarang digambarkan sebagai “Presiden Martir” oleh FC Barcelona.

Bukti lain dari adanya identitas Catalan di FC Barcelona adalah penggunaan bahasa Catalan. Penggunaan bahasa dapat dilihat mulai dari lagu para suporter, *website*, bahasa antar pemain maupun suporter. Jika dilihat dari jargon-jargon para pendukung FC Barcelona akan sering terdengar “*Visca Barca! Visca Catalunya!*” yang artinya adalah “Hidup Barca! Hidup Catalonia!”. Jargon ini merupakan jargon dalam bahasa Catalan. Jargon ini juga tidak hanya diserukan oleh pendukung di dalam stadion, tapi juga oleh pendukung Barcelona di dunia.

Di dalam *website* resminya, FC Barcelona juga memiliki edisi berbahasa Catalan. Format tersebut merupakan bentuk apresiasi klub terhadap bahasa asli mereka dan menunjukkan keterikatan mereka terhadap budaya Catalan. Bahasa yang digunakan oleh pemain dapat dilihat salah satunya dari contoh perayaan juara Liga Champions Eropa pada tahun 2011 di Camp Nou (stadion resmi FC Barcelona). Pada perayaan juara, pemain maupun pelatih memberikan pidato dan ucapan terima kasih yang kesemuanya dilakukan dalam bahasa Catalan. Jargon

“*Visca Barca! Y visca Catalonia!*” sering sekali terdengar setiap mereka mengakhiri pidato (Harter, 2011, hlm. 3-5).

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat peristiwa tersebut ke dalam penelitian yang berjudul “Konflik Pusat dan Daerah: Tantangan Demokrasi Catalonia dan Spanyol Tahun 2006-2019”. Maksud dari topik penelitian ini ialah bagaimana tantangan Catalonia sebagai daerah otonom dalam memperjuangkan demokrasi di Spanyol. Selain itu, peneliti juga melihat adanya keterikatan FC Barcelona dengan masyarakat Catalonia sebagai media dalam menyampaikan aspirasi mereka. Dari sisi historis masyarakat Catalonia, identitas regional berupa budaya dan bahasa yang berbedadengan masyarakat Spanyol lain kerap dijadikan suatu alasan untuk memisahkan diri sebagai negara yang baru.

Kemudian untuk periodisasi, peneliti mengambil rentang tahun 2006-2019 ialah karena pada tahun 2006 hingga 2019 terjadi serangkaian tantangan demokrasi yang dialami pemerintahan Catalonia berikut dengan masyarakatnya, baik berupa demonstrasi maupun melalui referendum. Konflik pemerintahan daerah dengan pusat ini menarik untuk digali lebih dalam mengingat minimnya kajian literatur berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, peneliti berharap bahwa kajian ini menjadi salah satu pelengkap penelitian mengenai tantangan demokrasi Catalonia dan reaksi FC Barcelona di Spanyol.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti. Adapun permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana konflik daerah otonom Catalonia dan Spanyol tahun 2006-2019?”. Berangkat dari masalah pokok tersebut, peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian, yang diantaranya:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara Catalonia dan Spanyol?
2. Bagaimana proses terjadinya konflik antara Catalonia dan Spanyol tahun 2006-2019?

3. Bagaimana reaksi FC Barcelona dalam menyikapi konflik Catalonia dan Spanyol tahun 2006-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terbagi ke dalam tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai konflik daerah otonom Catalonia dan Spanyol tahun 2006-2017. Adapun tujuan khusus penelitian ini ialah seperti:

1. Mendeskripsikan apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara Catalonia dan Spanyol.
2. Menjelaskan proses terjadinya konflik antara Catalonia dan Spanyol tahun 2006-2019.
3. Mendeskripsikan reaksi FC Barcelona dalam menyikapi konflik Catalonia dan Spanyol tahun 2006-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai konflik daerah otonom Catalonia dan Spanyol tahun 2006-2019. Disisi lain, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis seperti:

1. Memperkaya penelitian sejarah konflik di Eropa khususnya dalam tantangan demokrasi Catalonia dan reaksi FC Barcelona di Spanyol.
2. Menambah wawasan mengenai situasi sosial politik daerah otonom Catalonia dan Spanyol pada tahun 2006-2019.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai konflik daerah otonom Catalonia dan Spanyol.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi terdiri dari lima bab berdasarkan pedoman penelitian di Universitas Pendidikan Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi pemaparan mengenai latar belakang penelitian yang mencakup sejarah serta tantangan demokrasi antara daerah otonom Catalonia dan Spanyol tahun 2006-2019. Bab ini juga memuat alasan peneliti memilih topik ini, serta rumusan masalah yang dibuat untuk membatasi ruang lingkup kajian yang diteliti. Selain itu, bab ini menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan, serta struktur organisasi skripsi secara keseluruhan. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran awal yang komprehensif mengenai konteks dan fokus penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, berisi penjelasan mengenai tinjauan kepustakaan yang telah dilakukan oleh peneliti. Bab ini terdiri dari kajian kritis terhadap teori, konsep, serta penelitian terdahulu yang relevan dalam bentuk jurnal maupun skripsi sebagai pembanding. Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan orisinalitas topik yang dikaji dan memastikan bahwa penelitian ini memiliki landasan teoretis yang kuat. Selain itu, bab ini juga berfungsi sebagai landasan dan kerangka berpikir peneliti dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti, sehingga memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan penelitian.

Bab III Metode Penelitian, berisi metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Bab ini menjelaskan tahapan penelitian secara rinci, mulai dari persiapan penelitian, pemilihan topik, penyusunan rancangan penelitian, proses bimbingan dan konsultasi, hingga pelaksanaan penelitian dengan menggunakan metode sejarah. Penjelasan ini mencakup berbagai aspek teknis yang penting untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang sistematis dan terstruktur, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV Temuan dan Pembahasan, berisi hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Bab ini dimulai dengan pemaparan latar belakang terjadinya konflik antara daerah otonom Catalonia dan Spanyol. Selanjutnya, bab ini membahas proses terjadinya konflik antara Catalonia dan Spanyol selama periode 2006-2019, serta reaksi FC Barcelona terhadap konflik tersebut. Pembahasan ini dilakukan secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika konflik dan implikasinya. Dengan demikian, bab ini tidak hanya menyajikan data hasil

penelitian, tetapi juga menginterpretasikan temuan tersebut dalam konteks yang lebih luas.

Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan inti dari pembahasan temuan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Bab ini juga menyampaikan implikasi dari temuan penelitian serta memberikan rekomendasi terkait topik yang masih belum dikaji secara maksimal. Rekomendasi ini disusun untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya, sehingga dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji topik yang serupa. Dengan demikian, bab ini tidak hanya menutup penelitian secara formal, tetapi juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya pemahaman mengenai topik yang diteliti.